



RENJA 2027

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Email : dinpermadestmg@gmail.com

Website : dinpermades.temanggungkab.go.id

Faximili : (0293) 5345345

Telp : (0293) 419915

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP.,MM
NIP.198311182002122001

Petugas Verifikator,



TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP. 199707072020081003

Mengetahui,

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT , atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2027 dapat tersusun. Renja adalah dokumen perencanaan Dinpermades untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung, Renja mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas wewenang Dinpermades dan tindak lanjut dari Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tahun 2027.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan Renja Tahun Anggaran 2027. Kami berharap semoga Renja ini dapat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Juli 2026.

Plt. Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung,



Eko Budi Mulyanto, SE., MM
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 196811171990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38
2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD	42
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	54
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
2.8 Penghargaan	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	57
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	74
4.1 Program dan Kegiatan	74
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	78
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	78
BAB VI PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Temanggung	12
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung	27
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung	29
Tabel 2. 4 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027	29
Tabel 2. 7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027	45
Tabel 2. 8 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2027 Kab Temanggung	54
Tabel 2. 9 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2024 – 2026	54
Tabel 2. 10 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026	56
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2027	58
Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2027	63
Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2027	75
Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	78
Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

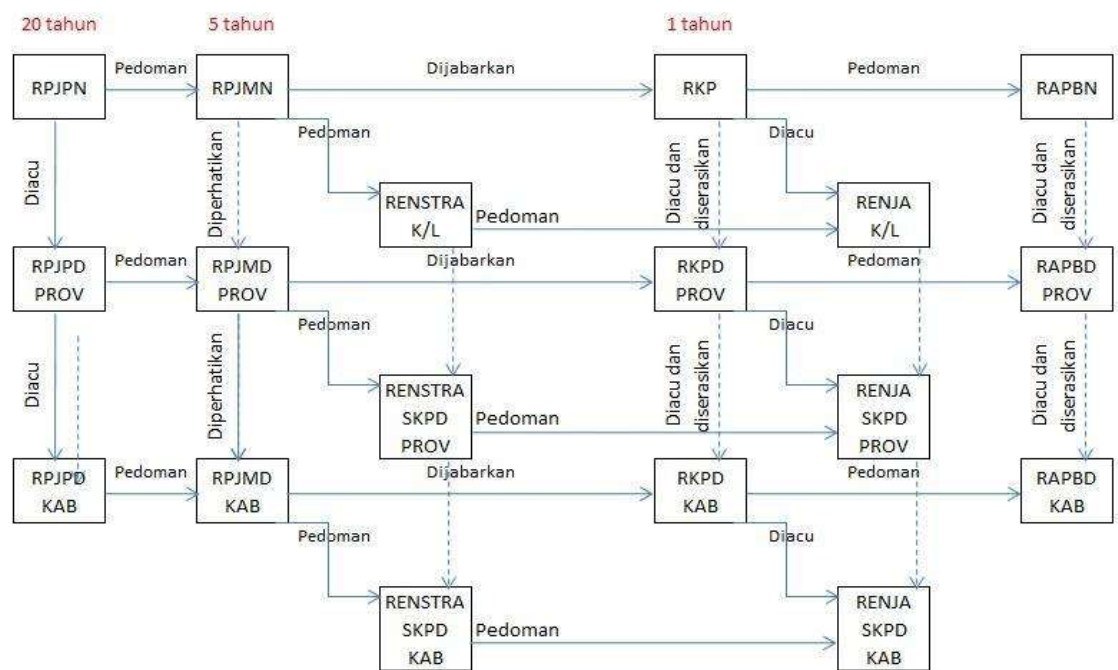
Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada

hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinpermades Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 2) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinpermades;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinpermades;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinpermades;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan Dinpermades;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan

serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinpermades;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam

rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinpermades Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinpermades 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026
Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	SAT UAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
					Targe t Renja PD Tahu n 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Ting kat Real isasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										1,952,500,262	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										1,952,500,262	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,292,406,271		917,686,212	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan		bula n	27	27	100	29	3,292,406,271	7	917,686,212	24,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								162,650,000		7,319,000	
	Penyediaan	Tersedianya		bula	4	4	100	2	3,800,000	0,5	109.000	25

	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	n								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	bulan	6	6	100	1	19,000,000	0,25	0	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	bulan	7	7	100	4	27,000,000	1	0	25
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	1	1	100	1	13,350,000	0,25	0	25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan	4	4	100	12	28,500,000	3	740.000	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	1	1	100	12	71.000.000	3	6.470.000	25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							234,698,320		55,087,678	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan	bulan	4	4	100	2	750,000	0,5	0	25

		materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	n								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	bula n	4	4	100	12	19,167,310	3	3.090.726	25
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer, Laptop printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan internet dll	bula n	4	4	100	12	9,500,000	3	722.000	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bula n	12	12	100	12	205,281,010	3	51.274.952	25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							95,000,000		12,948,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya emeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	bula n	22	22	100	22	80.000.000	5	12.048.000	22,72
	Pemeliharaan/	Terlaksana-	bula	2	2	100	2	15,000,000	0,5	900.000	25

	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	nya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	n								
	PROGRAM PENATAAN DESA							5,000,000		450,000	
		Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%								
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	unit	5	5	100	5	10.000.000	1,5	450.000	30
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							5,000,000		1,775,500	
		Persentase kerjasama antar Desa									
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga									
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	0			11	5,000,000	0,75	1.775.500	6,8
	PROGRAM							4,039,762,92		953,262,872	

	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							4			
		Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu									
		Presentase Desa dalam penyusunan RKPDDes tepat waktu									
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	doku men				266	5,000,000	60	0	0,22
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	doku men	266	266	100	266	10,000,000	60	1,160,000	22,56
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang				17	40,000,000	4	0	23,53
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara- an Pemilihan,	lapora n				17	235,696,000	4	4,797,000	23,53

	Desa	Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa									
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	desa	266	266	100	266	3.752.133.848	65	947.305.872	24,44
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	dokumen					-		-	-
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	dokumen					-		-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen					-		-	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang					5,000,000		0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,							265,000,000		3,971,000	

	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										
		Persentase laporan LKD									
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang									
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							265,000,000		3,971,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	doku men	55	55	100	9	5,000,000	15	1.502.500	166,67

		LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	%					-		-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	dokumen				40	5,000,000	15	1,523,500	37,5

		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan				20	5,000,000	5		25
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga	dokumen	20	20	100	20	250,000,000	5	945.000	25
								8,099,517,515		1,952,500,262	

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa
 - c. Program Peningkatan Kerja sama Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Hukum Adat.
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerja sama Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Hukum Adat.
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerja sama Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Hukum Adat.
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerja sama Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Hukum Adat.
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Faktor pendorong tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
- Semakin lengkapnya sarpras desa sehingga pelayanan dasar masyarakat semakin terpenuhi;
 - Dibentuknya Tim Pelaksana kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat, adanya google form yang disebar ke pengguna layanan;
 - Adanya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang selaras dan berkesinambungan;
 - Perdes Kewenangan wajib dibuat oleh Desa karena Perdes ini sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
 - adanya potensi desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha;
 - adanya potensi desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha;
 - Keseuaian antara RKPDDes, APBDDes dan pelaksanaan di lapangan;

- Kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan sehingga desa memahami tata cara penyusunan RKPDes sesuai pedoman yang sudah ditetapkan;
 - kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan sehingga desa memahami tata cara penyusunan Laporan LKD;
 - BUMDes diberi peran untuk melaksanakan program ketapang.
6. Faktor penghambat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
- Masih terdapat beberapa desa yang sarprasnya belum lengkap sehingga pelayanan dasar masyarakat belum bisa terpenuhi semua;
 - Waktu pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana yang masih kurang maksimal;
 - Kurangnya bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan dalam pemenuhan kriteria sub-komponen yang dinilai;
 - Masih terdapat beberapa desa yang sarprasnya belum lengkap sehingga pelayanan dasar masyarakat belum bisa terpenuhi semua;
 - Selain daftar kewenangan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa kesulitan dalam menentukan kewenangan selain yang telah tercantum dalam peraturan tersebut;
 - Kurangnya pemahaman teknis terkait mekanisme kerjasama antar Desa;
 - Kurangnya pemahaman teknis terkait mekanisme kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - Ada beberapa Desa yang LPPD nya belum mendapatkan evaluasi dan persetujuan dari BPD;

- Kurang Optimalnya tim penyusun dalam membuat RAB dan gambar teknis sehingga perlu pendampingan yang intensif;
 - Belum semua desa membuat peraturan desa tentang LKD, masih adanya rangkap jabatan, masa jabatan LKD belum sesuai regulasi yang sudah ada dan laporan LKD dibuat diakhir tahun (akhir Triwulan IV);
 - Karena tahun 2025 belum ada pemeringkatan Bumdesa sehingga masih menggunakan data pemeringkatan tahun 2024.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
- Berdasarkan Tabel 2.1 Triwulan I tahun 2026 dapat diketahui pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2026 diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
- Untuk capaian target program diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi dan teknis, serta penguatan koordinasi agar target capaian program pada akhir Tahun 2026 tetap dapat diwujudkan.
8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Menetapkan target yang jelas dan realistis.
 - Menyusun rencana kerja yang sesuai dengan prioritas dan tujuan.
 - Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan.
 - Menentukan skala prioritas penggunaan sumber daya.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran.
 - Menyesuaikan rencana dan anggaran apabila terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan.

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bidang agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu 100 %. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta pemberdayaan desa berbasis masyarakat, dengan capaian 100%.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian 100%.
3. Sasaran Program 1 : Program Penataan Desa, dengan capaian 100%.
4. Sasaran Program 2 : Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan capaian 100%.
5. Sasaran Program 3 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat, dengan capaian 100%.
6. Sasaran Program 4 : Peningkatan Kerja sama Desa dengan capaian 100%.

1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan Minimal (*jika ada*) dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Persentase Desa Mandiri	%	39,47	41,35	43,23	52,63	52,63	0	ST
2	Nilai Skor Indeks Desa	%	91,35	92,86	94,36	94,73	94,73	0	ST
3	Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	81,00	81,25	81,50	82,86	0	0	ST
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	70,09	70,10	70,15	71,75	0	0	ST
INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase fasilitasi penyelenggaraan penataan Desa	%	90	100	100	100	0	0	ST
2	Persentase kerjasama antar Desa	%	66,66	100	100	100	0	0	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
3	Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	66,66	100	100	100	0	0	ST
4	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	90	100	100	100	0	0	ST
5	Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	90	100	100	100	0	0	ST
6	Persentase laporan LKD	%	4,2	8,33	16,67	4,94	0	0	ST
7	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	39,41	40,6	42,85	42,11	0	0	ST

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR SPM									
1	Nihil								
2									

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR SPM									
1	Nihil								
2									

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
INDIKATOR IKK									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	0	0	ST
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	3,70	3,85	4	38,61	0	0	ST
3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	%	66,66	100	100	100	0	0	ST

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator kinerja	satuan	Target		Capaian		TW I 2026
			2025	2026	2025	2026	0
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	81,00	81,25	82,86	82,86	0
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	70,09	70,10	71,75	71,75	0
3	Persentase desa mandiri	%	39,47	41,35	52,63	52,63	0
4	Nilai Skor Indeks desa	%	91,35	92,86	94,73	94,73	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai indeks kepuasan masyarakat Dinpermades pada tahun 2025 82,86 sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 81,00. Capaian kinerja nilai IKM Dinpermades adalah 100% masuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk tahun 2026 triwulan II adalah 0, dikarenakan survey kepuasan masyarakat masih dalam proses survei dan penghitugan baru dilakukan pada setiap akhir tahun.
 - Faktor Pendorong untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dibentuk Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat, tersedianya sumber daya manusia yang memahami metode survei dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti survei berbasis aplikasi atau formulir daring serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam memberikan penilaian dan masukan.
 - Faktor penghambat dalam pelaksanaan survei yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengisi

- kuesioner, kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan dalam survei serta keterbatasan akses teknologi, terutama di wilayah dengan jaringan internet yang kurang baik.
- Rekomendasi tindaklanjutnya adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya SKM kepada masyarakat, dan memanfaatkan sistem survei digital untuk mempercepat pengumpulan dan analisis data.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Nilai AKIP perangkat daerah merupakan indikator kinerja ke 2 dari sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan di Desa Serta Pemberdayaan Desa Berbasis Masyarakat”. Realisasi nilai AKIP Dinpermades di tahun 2025 adalah 71,75 dari target yang ingin dicapai sebesar 70,09, yang berarti bahwa realisasi telah mencapai target, capaian kinerja sebesar 100%.

- Faktor pendukung tercapainya nilai AKIP Dinpermades adalah adanya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang selaras dan berkesinambungan.
- Faktor Penghambat adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen SAKIP dan analisis kinerja, serta belum optimalnya tingkat pemahaman seluruh ASN dalam penerapan dan komitmen terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Rekomendasi untuk Meningkatkan Nilai AKIP
Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP dari instansi pembina atau evaluator dengan rencana aksi yang terukur.

B. INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM							
			Target		Realisasi TW I		Capaian
	Indikator kinerja	satuan	2025	2026	2025	2026	
1	Presentase fasilitasi penyelenggaraan penataan Desa	%	90	100	100	100	100
2	Persentase kerjasama antar Desa	%	66,66	100	100	0	100
3	Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	66,66	100	100	0	100
4	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	90	100	100	100	100
5	Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	90	100	100	0	0
6	Persentase laporan LKD	%	4,2	8,33	16,67	4,94	59.30
7	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	39,53	40,6	42,11	42,11	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

Semua target Indikator program tahun 2025 sudah mencapai target 100%, sedangkan realisasi tahun 2026 pada triwulan I masih menggunakan data tahun 2025. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja realisasi masih 0 (nol) dikarenakan pada triwulan I tahun 2026 kegiatan masih dalam tahap persiapan.

Yang menjadi faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut dari masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

1. Presentase fasilitasi penyelenggaraan penataan Desa

- Faktor pendorongnya adalah Perdes Kewenangan wajib dibuat oleh Desa karena Perdes ini sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
- Faktor penghambatnya adalah ercapainya target adalah selain daftar kewenangan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa kesulitan dalam menentukan kewenangan selain yang telah tercantum dalam peraturan tersebut.
- Rekomendasi tindaklanjutnya adalah melakukan melakukan identifikasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2. Persentase kerjasama antar Desa

- Faktor pendorongnya adalah adanya potensi desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha.
- Faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman teknis terkait mekanisme kerjasama antar Desa.
- Rekomendasinya adalah melakukan fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar desa untuk melakukan pendampingan dalam fasilitasi kerjasama antar desa.

3. Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga

- Faktor pendorongnya adalah adanya potensi desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha
- Faktor Penghambatnya Adalah kurangnya pemahaman teknis terkait mekanisme kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- Rekomendasinya adalah Fasilitasi dan pembinaan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

4. Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu.

- Faktor pendorongnya adalah adanya Kesesuaian antara RKPDes, APBDes dan pelaksanaan di lapangan sehingga ketika menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat mudah tidak ada hambatan. Selain itu adanya kesadaran dari Pemerintah Desa untuk menyusun LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Faktor Penghambatnya adalah Ada beberapa Desa yang LPPD nya belum mendapatkan evaluasi dan persetujuan dari BPD
- Rekomendasinya adalah Melakukan Desk penyusunan LPPD, Evaluasi atas LPPD yang telah disusun dan Bintek bagi BPD

5. Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu.

- Faktor pendorongnya Kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan sehingga desa memahmi tata cara penyusunan RKPDes sesuai pedoman yang sudah ditetapkan
- Faktor Penghambatnya adalah Kurangnya Optimalnya tim penyusun dalam membuat RAB dan gambar teknis sehingga perlu pendampingan yang intensif
- Rekomendasinya adalah Fasilitasi. monitoring dan pendampingan yang intensif kepada desa dalam pelaksanaan penyusunan RKPDes

6. Presentase Laporan LKD.

- Faktor pendorongnya adalah kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan sehingga desa memahami tata cara penyusunan Laporan LKD
- Faktor Penghambatnya adalah belum semua desa membuat peraturan desa tentang LKD, masih adanya rangkap jabatan, masa jabatan LKD belum sesuai regulasi yang sudah ada dan laporan LKD dibuat diakhir tahun (akhir Triwulan IV)
- Rekomendasinya adalah fasilitasi penyusunan Laporan LKD dan Program kerja

7. Presentase BUM Desa Maju dan berkembang.

- Faktor pendorongnya adanya BUMDes diberi peran untuk melaksanakan program ketapang
- Faktor penghambatnya adalah karena tahun ini belum ada pemeringkatan bumdesa shg masih menggunakan data pemeringkatan tahun 2024
- Rekomendasinya adalah Optimalisasi pembinaan dan monitoring BUMDes

C. INDIKATOR SPM

Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR SPM									
1	Nihil								
2									

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Persentase pengentasan Desa Tertinggal

- Faktor pendorongnya adalah semakin berkembangnya sarana dan prasarana yang ada di desa sehingga meningkatkan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintah dan aksesibilitas yang mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
- Faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM dalam tata kelola administrasi dan inovasi layanan masyarakat serta minimnya infrastruktur dasar, rendahnya literasi desa dan ketergantungan yang berlebih pada dana transfer sehingga perkembangan

sarana dan prasarana kurang maksimal, hal ini menyulitkan distribusi hasil tani dan pengembangan UMKM lokal.

- Rekomendasi tindaklanjutnya adalah melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa sehingga terwujud optimalisasi potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas status kemandirian dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

2. Persentase peningkatan status Desa Mandiri

- Faktor pendorongnya adalah ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, transportasi dan pelayanan umum yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
- Faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM yang menghambat tata kelola administrasi dan inovasi layanan masyarakat serta minimnya infrastruktur dasar, rendahnya literasi desa dan ketergantungan yang berlebih pada dana transfer sehingga perkembangan sarana dan prasarana kurang maksimal, hal ini menyulitkan distribusi hasil tani dan pengembangan UMKM lokal.
- Rekomendasi tindaklanjutnya adalah melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa sehingga terwujud optimalisasi potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas status kemandirian dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri =
(Jumlah desa yang menjadi Desa Mandiri pada tahun

berjalan ÷ Jumlah desa sasaran peningkatan status menuju Desa Mandiri) × 100%.

3. Persentase fasilitasi kerja sama Desa

- Faktor pendorongnya adalah Adanya regulasi yang mengatur kerja sama desa dan dukungan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan.
- Faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai mekanisme dan manfaat kerja sama desa dan kurangnya promosi potensi desa kepada pihak ke tiga dan terbatasnya akses desa terhadap mitra strategis.
- Rekomendasi tindaklanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan serta hasil kerja sama untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat dan mendorong pembentukan kerja sama yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi desa, pengelolaan potensi bersama, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.7. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinpermades dari 7 (tujuh) indikator, sampai dengan triwulan I tahun 2026 terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target yaitu :
 - Indikator Persentase kerjasama antar Desa

Hal ini disebabkan karena kegiatan baru dalam tahap persiapan menginventarisasi dan pengumpulan data serta dilakukan pendampingan dari Dinpermades bagi desa-desa yang akan melakukan kerjasama antar desa.

- Indikator Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga
Hal ini disebabkan karena kegiatan baru dalam tahap persiapan menginventarisasi dan pengumpulan data serta dilakukan pendampingan dari Dinpermades bagi desa-desa yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- Indikator Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu

Hal ini disebabkan karena kegiatan baru dalam tahap persiapan pembentukan tim penyusun, proses pencermatan program dan kegiatan, hingga musyawarah desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun setiap tahun yang berlandaskan RPJM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023. Dokumen RKPDes diperuntukkan untuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat umum yang berperan dalam perencanaan pembangunan desa.

- Indikator penyusunan LPPD tepat waktu

Hal ini disebabkan karena kegiatan dalam tahap persiapan dan pelaporan baru dilaksanakan pada akhir tahun. Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Persentase laporan LKD

Hal ini disebabkan karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan pelaporan baru dilaksanakan pada akhir tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) terdiri dari LPM, PKK,

Posyandu, Karang Taruna, RT dan RW. Laporan LKD berisi gambaran umum desa dan kondisi lembaga kemasyarakatan desa. Penyusunan LKD berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- Indikator Persentase BUM Desa Maju dan berkembang
Hal ini disebabkan karena kegiatan dalam tahap klarifikasi data pemeringkatan dari Kemendes dan pembinaan tata kelola Bumdes melalui kegiatan Sapa Bumdes. Kegiatan direncanakan dilaksanakan sampai akhir tahun.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

- Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas/sarana prasarana seperti kendaraan dinas untuk mobilitas dan untuk monitoring, peralatan kantor seperti laptop, printer, jaringan internet belum memadai.
- Peraturan Daerah tentang Pilkades, Aset Desa, Perangkat Desa, BPD, Dan Keuangan Desa yang ditarget hingga akhir bulan Juli 2026 juga belum selesai.
- Belum ada regulasi yang mengatur tentang Batas Desa di Kabupaten Temanggung.

Peraturan Bupati yang harus diselesaikan di tingkat kabupaten, misal Perbup Batas Desa per desa ada 266 Perbup, per kecamatan 20 Perbup. Saat ini baru disusun perbup untuk kecamatan Tlogomulyo dari 2024 akhir hingga sekarang belum selesai dan ada 2 (dua) perbup amanat dari UU Desa yang belum disusun yaitu Perbup Standar Pelayanan Minimal Desa dan Perbup Penyusunan Peraturan Desa. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas untuk operasional program.

- Aturan tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum sesuai dengan kondisi/persoalan Tata Ruang Desa.

Di Kabupaten Temanggung sebagian besar tanah kas desa masuk polar uang sawah irigasi, sawah non irigasi, LP2B dan LSD.

Atuean LSD juga tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa, sehingga Pembangunan di desa terkendala Lokasi yang termasukn tidak boleh untuk dialihfungsikan.

- Belum semua BUM Desa berbadan hukum.

Pengelola BUM Desa belum bisa maksimal dalam mengelola kegiatan usaha BUMDes sehingga kegiatan usaha belum bisa berkembang sesuai yang diharapkan. Kontribusi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa belum bisa ditingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat desa belum tercapai

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:

- Realisasi kinerja yang belum mencapai target pada triwulan 1 tahun 2026 belum membawa dampak pada pencapaian visi misi Bupati maupun pencapaian program nasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades, antara lain :

- Perubahan dan perkembangan regulasi
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintahan desa.

5. Peluang

- Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf
- Tersedianya regulasi yang mengatur tentang penataan desa, adm instrasi pemerintahan desa.

6. Formulasi isu-isu penting

yaitu belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan administrasi Desa.

Rekomendasi :

- Guna mengoptimalkan tata kelola administrasi desa dan pelayanan kepada masyarakat gunakan aplikasi desa atau website

resmi untuk administrasi (surat keterangan, pengajuan bantuan, dll.) agar lebih cepat dan transparan;

- Sediakan Papan informasi publik berupa papan pengumuman digital maupun fisik yang rutin diperbarui, sehingga warga mudah mengakses informasi;
- Melibatkan warga dalam perencanaan dan evaluasi program desa;
- Sediakan kotak aspirasi & survei online untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau ide;
- Peningkatan SDM Aparat Desa melalui peningkatan kapasitas SDM, untuk aparat desa dalam bidang administrasi, keuangan, pelayanan publik, guna memperkuat kinerja dalam memberikan pelayanan.

1.8. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Pembangunan/rehabilitasi gedung serbaguna	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Pemeliharaan/pembangunan gedung kantor dan balai Desa	Dinpermades	Program Penataan Desa
	Pembangunan/rehabilitasi gedung Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama	Dinpermades	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kelembagaan Desa	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan Desa	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2026

Telaah Pokok Pikiran DPRD tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Total pikir yang diusulkan sebanyak 83 usulan.
- Jumlah pikir yang disetujui ada sebanyak 56 usulan
- Jumlah pikir yang ditolak/dikembalikan dan dibatalan ada 27 usulan, dengan rincian sebagai berikut :
- 12 titik bukan kewenangan Diperpermades, 15 titik karena permasalahan lahan, 11 titik pengadaan doble anggaran pada lokasi yang sama, 1 salah lokasi dan 2 titik karena permasalahan sarpras.

1.9. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinpermades, yaitu sejumlah 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa
- c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- d. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.606.415.244	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.558.550.356	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	750.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	750.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	750.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	750.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.320.685.997	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	3.320.685.997	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					161.150.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.650.000	
	Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket	4	paket	3.800.000		Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket	12	bulan	3.800.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	17.500.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	14.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	27.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	32.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	13.350.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8.350.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	28.500.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	12	laporan	28.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
										Tamu				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung		12	laporan	71.000.000		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung		12	laporan	71.000.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.698.320	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.698.320	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	750.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	19.167.310,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	19.167.310,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	laporan	9.500.000,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	12	laporan	9.500.000,00	
	Penyediaan	Kab. Temang	Jumlah	12	laporan	205.281.010,00		Penyediaan	Kab. Temang	Jumlah	12	laporan	205.281.010,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	gung	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Jasa Pelayanan Umum Kantor	gung	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					130,000,000	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					130,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temang gung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	unit	80,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temang gung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	gedung	50,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	gedung	50,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
B	PROGRAM PENATAAN DESA					5.000.000	B	PROGRAM PENATAAN DESA					4.000.000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temang gung	Jumlah desa yangterfasilitasi kegitan TMMD dan Karya Bhakti	5	desa	5.000.000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temang gung	Jumlah desa yangterfasilitasi kegitan TMMD dan Karya Bhakti	5	desa	4.000.000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					5.000.000	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					4.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	10	dokumen	5.000.000		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	10	dokumen	4.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	-	-	0		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	-	-	0	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.804.066.924	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,394,016,039	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	dokumen	5.000.000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Desa	266	dokumen	4.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	266	dokumen	5.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil	266	dokumen	4.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Keuangan Desa							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	266	orang	40.000.000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	266	orang	32.000.000	
	Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	0		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa	215	lapoan	159,012,500	Fasilitasi Pilkades serentak Tahun 2027- 2028
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	266	laporan	3,744,066,924		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	266	laporan	3,741,353,539	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	dokumen	5.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	dokumen	4.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temang gung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1766	orang	5.000.000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temang gung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1766	orang	449,650,000	Penamba han anggaran Fasilitasi pengisian anggota BPD Tahun 2027
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					265.000.000	E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					312.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	9	dokumen	5.000.000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat	9	Idokume n	54.000.000	Adanya optimalisasi Posyandu 6 SPM , akan diadakan egiatan Fasilitasi Posyandu 6 SPM
	Peningkatan Kapasitas	Kab. Temang gung	Jumlah Lembaga Kemasyarakata	-	-	0		Peningkatan Kapasitas	Kab. Temang gung	Jumlah Lembaga Kemasyarak	-	-	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasny a				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40	dokumen	5.000.000		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa	40	dokumen	4.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	20	laporan	5.000.000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	20	laporan	4.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Tepat Guna					Guna		Teknologi Tepat Guna				
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	dokumen	250.000.000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelengga raan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga	20	dokumen	250.000.000	

Sumber : [PERANGKAT DAERAH] Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

1.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.8
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

Sumber : (DINPERMADES) Kabupaten Temanggung, 2026

1.11. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades ada 6 (enam) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIPEMDES (Sistem Informasi Pemerintahan Desa)	Dinpermades	PD APBD	Database Perangkat Desa dan Kepala Desa	Data Perangkat Desa dan Kepala Desa-Data bengkok desa	Tersedianya data perangkat desa dan Kepala Desa	Sipemdes Dinpermades Tahun 2017 sd. sekarang
2	Sapa BumDes	Dinpermades, Tenaga Ahli Pemdes, KPP Pratama, Dinkominfo	-		100% BUM Desa di Kabupaten Temanggung terdaftar sebagai badan	Minimal 10% produk pangan dari BUM Desa bisa diperdagangkan ke	

		nfo,Kecamatan dan Bumdes			hukum pada 2026	pasar formal karena sudah memenuhi syarat legalitas usaha yang diakui dan dilindungi oleh Negara	
3	Pemanfaatan Media Spreadsheet	Dinpermades	-		Optimalisasi pengelolaan dokumen	Dokumen Perdes APBDes	Dinpermades Tahun 2026
4.	QR Code	Dinpermades	-		Optimalisasi informasi jenis layanan	SKM	Dinpermades Tahun 2026
5.	MODENA (Monitoring Dana Desa)	Dinpermades	-		Monitoring Dana Desa	Laporan monev	Dinpermades Tahun 2026
6.	Bum Desa	Dinpermades	-		Pengelolaan data BUMDes	Laporan BUMDes	Dinpermades Tahun 2026

Sumber : DINPERMADES Kabupaten Temanggung, 2026

1.12. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 4 (empat) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Gubernur	Daerah	Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang
2	Lomba BUMDes Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Gubernur	Daerah	BUMDes Prada Mulia Kecamatan Ngadirejo (Juara 3)
	Lomba Inovasi Pengelolaan Sampah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Gubernur	Daerah	Desa Tanurejo Kecamatan Bansari (juara 2)
	Lomba Desa Brilliant Tingkat Nasional Tahun 2024	BRI dan Kemendes	Nasional	Desa Bansari Kecamatan Bansari

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.13. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinpermades lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung.

1.14. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Tujuan Dinpermades yang dirumuskan dalam Renstra Dinpermades 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kemadirian Desa” dengan sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinpermades .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumenn renstra 2024-2026)

Tabel 3. 1.**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2027**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2027
Meningkatnya kemandirian desa			Persentase desa mandiri	%	43,23	43,23
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat		Nilai skor indeks desa	%	94,36	94,36
			Nilai IKM Perangkat Daerah	angka	81,50	81,50
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	70,15	70,15
		Program penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100	100

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar Desa	%	100	100
			Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	100	100
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	100	100
			Presentase Desa dalam penyusunan RKPDDes tepat waktu	%	100	100
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat. dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	%	16,67	16,67
			Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	42,85	42,85

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029.

1.15. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 2 bidang/urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibagi menjadi 4 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan sbb :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Program Penataan Desa
 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- C. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- D. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 4. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 5. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna).
 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 3. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Anggaran keseluruhan pada tahun 2027 adalah sebesar Rp. 8.553.484.015,00 yang bersumber dari dana APBD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2027						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Capaian Program	Keluar-an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas i Outp ut Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Su m- ber Da na		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						P r o g r a m	Kelua r-an Sub Kegiatan	Ha sil Ke gi at an				Tolo k Ukur	Tar get	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							8.553.484.015					8.049.870.628	
5.2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2.13.01.2.01	Perencanaan, Pengangga- ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksan anya Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah		Terlak san an ya Peren canaa n, Penga nggar an, dan Evalu asi Kinerj a Peran gkat	Kab. Teman ggung				1.500.000					2.500.000

				Daerah										
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Teman ggung				750.000					1.500.000
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Teman ggung				750.000					1.000.000
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia nya Adminis trasi Keuangan Perangk a t Daerah			Kab. Teman ggung				3.292.406.271					2.686.571.430
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjang-an ASN		Kab. Teman ggung				3.292.406.271					2.686.571.430
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia nya Adminis trasi			Kab. Teman ggung				161,150,000					188.383.661

		Umum Perangka t Daerah												
2.13.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor"		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disedia kan		Kab. Teman ggung				3,800,000					8.000.000
2.13.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perleng-kapan Kantor yang Disediakan		Kab. Teman ggung				17,500,000					23.000.000
2.13.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Teman ggung				27,000,000					27.000.000
2.13.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						13,350,000					15.000.000
2.13.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								28,500,000					33.383.661
2.13.01.2.06.00 09	Penyelenggara an Rapat								71,000,000					82.000.000

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah- an Daerah	Tersedia- nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah- an Daerah							234,698,320					250.819.284
2.13.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750,000					5.000.000
2.13.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuni- kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						19,167,310					23.176.116
2.13.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						9,500,000					13.000.000
2.13.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan-an Umum Kantor yang Disediakan						205,281,010					209.643.168

2.13.01.2.09	Pemelihara-an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah	Terpelihar anya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah							130,000,000					113.500.000
2.13.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorang-an Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar-kan Pajaknya						80,000,000					83.000.000
2.13.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abi litasi						50,000,000					30.500.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								5,000,000					10.146.097
2.13.02.2.01	Penyelenggara an Penataan Desa	Terlaksan anya Fasilitasi Penyeleng garaan							5,000,000					10.146.097

		Penataan Desa												
2.13.02.2.01.006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah sarpras Desa yg terfasilitasi						5,000,000					10.146.097
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								5,000,000					10.146.097
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						5,000,000					10.146.097
2.13.03.2.01.001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab./Kota						-5,000,000					10.146.097
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							4.408.729.424					4.625.466.502
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara-	Terlaksananya Pembinaan dan												

	raan administrasi pemerin-tahan Desa	Pengawa san Penyeleng garaan Administr asi Pemerinta han Desa												
2.13.04.2.01.00 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						5.000.000					17.000.000
2.13.04.2.01.00 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelola an Keuangan Desa						5.000.000					23.000.000
2.13.04.2.01.00 05	Pembinaan PeningkatanK apasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerin-tah Desa yang Mengikuti Pembina-an Peningkatan Kapasitas						40.000.000					30.000.000
2.13.04.2.01.00 09	Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pember- hentian Kepala Desa						159,012,500					442.332.654
2.13.04.2.01.00 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhenti		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian						3,744,066,924					3.992.133.848

	an Perangkat Desa		Perangkat Desa											
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun											15.000.000
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa											25.000.000
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											20.000.000
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas						450.650.000					30.000.000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											31.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT								315,000,000					162.337.557

	DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota													162.337.557
2.13.05.2.01.00 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurah an (RT, RW,		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendaya gunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang						55,000,000					22.000.000

	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya										10.337.557
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						5,000,000				20.000.000
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi						5,000,000				10.000.000

	Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						250,000,000					100.000.000

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi penambahan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Pilkades 2027-2028, Fasilitasi pengisian anggota BPD tahun 2027 dan Fasilitasi Posyandu 6 SPM.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.553.484.015		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.553.484.015	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.553.484.015		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.553.484.015	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.553.484.015		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.553.484.015	-
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.819.754.591	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.819.754.591	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.292.406.271	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.292.406.271	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.292.406.271		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.292.406.271	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.150.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.150.000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,800,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,800,000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,500,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,500,000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,000,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,350,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,350,000	-

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,000,000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,698,320
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,167,310
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,281,010
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000
B	PROGRAM PENATAAN DESA	5,000,000
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5,000,000
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	5,000,000
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	5,000,000
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,408,729,424
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5,000,000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,500,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,000,000	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,698,320	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,167,310	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,500,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,281,010	-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,000,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000.00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	-
B	PROGRAM PENATAAN DESA	5,000,000	-
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5,000,000	-
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	5,000,000	-
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	5,000,000	-
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,408,729,424	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5,000,000	-

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5,000,000	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40,000,000	-
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	159,012,500		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	159,012,500	-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000	-
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,744,066,924		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,744,066,924	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	450,650,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	450,650,000	-
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	315,000,000.00	E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	315,000,000.00	-
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	55,000,000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	55,000,000	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5,000,000		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5,000,000	-
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5,000,000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5,000,000	-
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250,000,000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250,000,000	-
	JUMLAH	8.553.484.015		JUMLAH	8.553.484.015	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan /penurunan pagu indikatif Tahun 2027.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut: *(disesuaikan dengan IKU OPD)*.

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANG AN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase desa mandiri	%	52,63	43,23	DINPERMADES
2	Nilai Skor Indeks desa	%	94,73	94,36	DINPERMADES

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinpermades sebagaimana tabel berikut.

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	100	100	DINPERMADES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		0		
		58	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	14	4,00	DINPERMADES
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		26		

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 7.267198.281,00 (95,70%), realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,30 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 1.952.500.262,00 (24,16%), realisasi Belanja Modal sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.553.484.015,00 yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 3.819.754.591; Program Penataan Desa sebesar Rp 5,000,000,00, Program Peningkatan Kerjasama Desa sebesar Rp. 5.000.000,00, Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4,408,729,424,00 dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 315.000.000,00.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 15 Juli 2026.

Plt. Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung,



Eko Badi Mulyanto, SE., MM
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 196811171990031002